

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti, sebaiknya memiliki penelitian terdahulu (*literatur review*) yang dapat diajukan acuan dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan survei literatur untuk mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan penelusuran literatur dan melakukan tinjauan pustaka, dapat dijadikan sebagai acuan referensi.

Dalam melaksanakan penelitian terkait “Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung” Peneliti melakukan tinjauan terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian pertama yang berjudul “**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Urban Farming* KAMIKITA *Community Centre* Kecamatan Kuta Alam Kota Bnada Aceh**” Oleh Rina Fauzina pada tahun 2022. Pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat melalui program *Urban Farming* Kamikita *community centre* di Kecamatan Kuta Alam Kota Bnada Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program *Urban Farming* mampu memberdayakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja, memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang bercocok tanam sehingga menciptakan

produktifitas bagi masyarakat, menjalin kerjasama antara pihak program kami KITA dengan aparat desa setempat agar menjaga lingkungan sehat dan bersih melalui kegiatan gotong royong. Faktor pendukung program *Urban Farming* melalui adanya kerjasama antara pihak komunitas dengan aparat desa, masyarakat serta ketelibatan PLN, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan tentang pengolahan sampah daur ulang. Faktor penghambat dalam microgreens adanya hama tanaman. Kurang idealnya lahan sehingga perlunya tenaga yang ekstra bagi para pekerja, kurangnya mesin pengolahan sampah daur ulang serta kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan *Urban Farming* . Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti adalah Variabel Pemberdayaan keluarga miskin dan juga metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian terdapat pada sasaran, aspek yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu pemberdayaan dan lokasi penelitian.

Penelitian yang kedua berjudul “**Implementasi Program *Urban Farming* di Kawasan Permukiman Dalam Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar**” Oleh Siti Ainun Rahman tahun 2018. Pada penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan dan penerapan *Urban Farming*, respon masyarakat mengenai penerapan *Urban Farming*, dan presentase potensi lahan perkarangan termanfaatkan dan belum termanfaatkan. Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan masyarakat di RW 06 Kelurahan Gunung Sari masuk dalam kategori cukup mengetahui dengan skor sebesar 3,225. Sementara tingkat penerapan *Urban Farming* yang dilakukan oleh masyarakat di RW 06 Kelurahan Gunung Sari masuk dalam kategori kurang baik dalam menerapkan *Urban Farming* dimana skor rata-rata dari jawaban reponden

sebesar 2,275. Respon masyarakat dalam hal ini manfaat yang dirasakan responden selama menerapkan *Urban Farming* masuk dalam katogori cukup bermanfaat dimana skor rata-rata jawaban responden sebesar 2,875. Sementara minat masyarakat dalam mengembangkan *Urban Farming* masuk dalam kategori sangat berminat denga skor rata-rata sebesar 3,4. Potensi lahan pekarangan yang belum termanfaatkan sebesar 58%. Hal ini dapat diartikan bahwa di RW 06 Kelurahan Gunung Sari masih memiliki potensi luas lahan pekarangan yang cukup besar untuk lebih mengembangkan penerapan *urban faming*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. Persamaan penelitian yang telah dilaksanakan ialah membahas terkait pelaksanaan program *Urban Farming* perbedaan penelitian terdapat pada metode penelitian yaitu gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pemaparan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan metoda statistika analisis frekuensi dan analisis tabulasi, yaitu untuk mengetahui jumlah jawaban responden dari kuesioner yang disebarakan secara kuantitatif beserta persentasenya.

Penelitian yang ketiga berjudul “**Evaluasi Program *Urban Farming* di Jakarta Barat**” oleh Eko Saputro tahun 2023. Penelitian yang dilakukan memakai metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada evaluasi program penyuluhan untuk dilakukan dalam upaya pengembangan program *Urban Farming* di Jakarta Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanian perkotaan di Jakarta Barat sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak namun masih belum efektif dan kurang optimal dari kegiatan budidaya, pengolahan serta pemasaran. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan pada aspek lokasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan juga hasil penelitian.

Pada umumnya, penelitian tersebut masih bersifat parsial dari pelaksanaan *Urban Farming* ini. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan pada lokasi penelitian yang sama, lalu mengidentifikasi sumber daya yang digunakan seperti air, tanah, bibit, sarana dan prasarana, sehingga dapat menganalisis sumber daya tersebut efisien untuk digunakan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini agar dapat berkelanjutan, dan dalam penelitian ini memberikan usulan program untuk memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program <i>Urban Farming</i> KAMIKITA <i>Community Centre</i> Kecamatan Kuta Alam Kota Bdana Aceh.	Kualitatif	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program <i>Urban Farming</i> mampu memberdayakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja, memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang bercocok tanam sehingga menciptakan produktifitas bagi masyarakat, menjalin kerjasama antara pihak program kamiKITA dengan aparat desa setempat agar menjaga lingkungan sehat dan bersih melalui kegiatan gotong royong.	Variabel Pemberdayaan keluarga miskin dan juga metode penelitian yaitu kualitatif	Sasaran, aspek, dan lokasi.
2.	Implementasi Program <i>Urban Farming</i> di Kawasan Permukiman Dalam Peningkatan	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan masyarakat di RW 06 Kelurahan Gunung Sari	Membahas terkait pelaksanaan program <i>Urban Farming</i>	Metode gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Presentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar		masuk dalam kategori cukup. Penerapan <i>Urban Farming</i> yang dilakukan oleh masyarakat di RW 06 Kelurahan Gunung Sari masuk dalam kategori kurang baik.		
3.	Evaluasi Program <i>Urban Farming</i> di Jakarta Barat	kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanian perkotaan di Jakarta Barat sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak namun masih belum efektif dan kurang optimal dari kegiatan budidaya, pengolahan serta pemasaran.	.	Lokasi, fokus, tujuan, metode ,dan hasil penelitian.

Sumber data : Hasil analisis peneliti 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti tinjau, maka disimpulkan bahwa belum ditemukannya penelitian yang dilaksanakan di lokasi dan sasaran yang sama yaitu Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Dalam penanganan dan pemberdayaan keluarga miskin dapat dikatakan memegang peranan penting yang jika dilihat dari

keterlibatannya dalam mengatasi urusan sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Teori dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Teori ACTORS (*Actor-Centered Theory of Development*) yang dikemukakan oleh Macaulay dan Cook (1996) merupakan pendekatan dalam ilmu pembangunan yang menekankan peran dan agency individu serta kelompok dalam proses pembangunan. Berbeda dengan pendekatan yang lebih struktural atau institusional, teori ACTORS memfokuskan perhatiannya pada aktor-aktor individu atau kelompok yang terlibat dalam pembangunan, dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya, mengambil keputusan, dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Teori-teori yang berpihak pada peran masyarakat luaslah lebih berhasil dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Teori yang semata-mata mengandalkan modal dan sumber daya alam telah usang. Sebaliknya, teori yang berorientasi pada manusia makin unggul dan cenderung berkembang, salah satunya adalah teori ACTORS.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi melalui teori ACTORS yaitu ;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Salah satu aspek dari teori ACTORS yang terkait dengan peran “Stimulator”. Dalam konteks ini, Stimulator mengacu pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan

dan pemberdayaan masyarakat. Stimulator dapat menciptakan berbagai program, kegiatan, atau kebijakan yang mendorong partisipasi aktif, pembelajaran, dan pengembangan potensi masyarakat.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Hal ini menunjukkan upaya yang holistik dalam memberdayakan masyarakat melalui kombinasi bantuan finansial, pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan penguatan lembaga lokal yang secara bersama-sama meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam membangun lingkungan mereka.
3. Melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dengan memberikan dukungan dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam persaingan dan mengurangi ketidakseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Selain itu, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak juga menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata.

Dalam Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali

yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.

Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain:

1. Mendorong adanya ketabahan
2. Mendelegasikan wewenang sosial
3. Mengatur kinerja
4. Mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern)
5. Menawarkan kerjasama
6. Berkomunikasi secara efisien
7. Mendorong adanya inovasi
8. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana dalam perubahan telah diantisipasi sehingga output yang akan dihasilkan berdayaguna secara optimum.

Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim "ACTORS" terdiri dari:

A : *Authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C : *Confidence dan Competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)

T : *Trust* (keyakinan)

O : *Oppurtunities* (kesempatan)

R : *Responbilities* (tanggung jawab)

S : *Support* (dukungan)

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu memberdayakan secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja "ACTORS" adalah sebagai berikut:

1. *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik;
2. *Confidence dan competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;
3. *Trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
4. *Oppurtunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
5. *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
6. *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih

baik.

Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor. Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat.

## **2.2.2 Pemberdayaan**

### **2.2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai objek pembangunan (Endah, 2020). Dalam kutipan tersebut peneliti memahami bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu kepada pentingnya proses sosial selama program berlangsung. Jadi, ia lebih beorientasi pada proses, bukan kepada hasil. Tujuan dari filosofis dari ini adalah untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat dan individu agar menggali potensi yang ada pada dirinya untuk ditingkatkan kualitasnya, sehingga akhirnya mampu mandiri. Terlihat bahwa proses pembelajaran dan adanya proses menuju pembuatan perubahan yang permanen merupakan kunci utama dalam pemberdayaan.

### **2.2.2.2 Tujuan Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu uaya dalam proses peningkatan kemandirian masyarakat, melalui berbagai macam program seperti; pengembangan usaha ekonomi, penguatan sistem komunitas lokal, swadaya

masyarakat, dan kegiatan lainnya yang mendekatkan masyarakat terhadap kesejahteraan. Tujuan utama pemberdayaan dititik beratkan mampu mengatasi segala problematika yang ada di masyarakat seperti, kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan dan menjadikannya lebih berdaya. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu berupa keadilan sosial. Tujuan pemberdayaan masyarakat kedalam beberapa bagian sebagai berikut; *better education, better accessibility, better action, better institution, better business, better income, better environment, better living, dan better community.*

Menurut Parsons dalam Hatu (2010) pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan bukan terjadi secara *hdan-to-hdan* diantar penggiat sosial dan individu. Akan tetapi tidak semua kegiatan kolketif mampu diintervensi oleh pekerja sosial. Dalam beberapa kasus, praktik pembedayaan masyarakat juga dilakukan secara individu ke individu.

### **2.2.2.3 Proses dan Tahapan Pemberdayaan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan sebuah proses, untuk itu subbab ini dibahas lebih jelas mengenai proses dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Menurut Huraerah dalam Darmayanti (2015) Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang tidak seketika dan tidak langsung jadi. Lebih lanjut Huraerah mengatakan proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving force*) sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan dalam hal ini adalah suatu proses agar dapat berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri.

Menurut Huraerah dalam Putra, Wisadirana, dan Mochtar (2016) menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat dapat dipahami dengan singkatan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan yang akan dijelaskan lebih jelas maksud dari masing-masing kata yang mewakili proses pemberdayaan tersebut

1. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, meghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan adalah memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan

posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Tahapan pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Tahapan kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut secara mandiri.
3. Tahapan ketiga, menentukan skala prioritas masalah.
4. Tahapan keempat, mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
5. Tahapan kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
6. Tahapan keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat, menurut Huraerah dalam Ismail dan Rachim (2016) menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada

masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Perkataan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dasar pdanaan demikian, memposisikan pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitanya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.
5. Memberdayakan juga mengdanung arti melindungi. Melalui proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengkerdulkan yang kecil dan

melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Melalui upaya-upaya dalam proses pemberdayaan di atas, dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat kelompok-kelompok masyarakat khusus yang dipandang rentan, lemah, terdeprivasi, tak beruntung (misalnya masyarakat miskin, perempuan, masyarakat cacat, kaum minoritas, masyarakat lanjut usia dan (anak-anak).

#### **2.2.2.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Moeljarto dalam Darmayanti (2015) mengemukakan bahwa strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

##### **1. Pembentukan kelompok**

Pembentukam kelompok merupakan fase awal dari pemberdayaan. Artinya masyarakat miskin atau masyarakat lemah diberi kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok yang diinginkannya. Pembentukan kelompok menyediakan suatu dasar bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok.

##### **2. Pendampingan**

Fungsi pendampingan sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), ataupun dinamisator (penggerak). Melalui pendampingan, kelompok diharapkan tidak tergantung pada pihak luar namun dapat dibantuk untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mdaniri.

### 3. Perencanaan

Kegiatan Tahap perencanaan kegiatan melengkapi tahap-tahap sebelumnya yang mementingkan peran aktif anggota kelompok untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kemampuannya. Prinsip-prinsip penting dalam tahap perencanaan kegiatan ini adalah (1) prinsip keterpaduan, dalam prinsip ini berarti suatu kegiatan pemberdayaan harus terkait dengan kegiatankegiatan lain dalam lingkup daerah tersebut, (2) prinsip kepercayaan, merupakan hakekat yang harus ada dalam partisipasi dan pemberdayaan, (3) prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kesetiakawanan dan kemitraan antar anggota kelompok, (4) prinsip kemandirian, prinsip ini menekankan bahwa kegiatan atau program harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri bahwa masyarakat miskin mampu menolong dirinya sendiri dan bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup anggota kelompok serta harus dapat berkembang secara berkesinambungan.

Strategi lain dalam pemberdayaan juga dijelaskan oleh Suharto dalam Putra et al. (2016), menurutnya dalam konteks sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:

1. Aras Mikro yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress manajemen dan crisis intervention. Tujuan utama dalam aras mikro ini adalah membimbing dan melatih klien atau masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Aras Mezzo adalah pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien, dalam hal ini adalah masyarakat miskin atau lemah. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Tujuannya adalah agar klien

atau masyarakat mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui kesadaran pengetahuan dan ketrampilan dengan menggunakan strategi pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok.

3. Aras Makro merupakan pendekatan dengan sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi yang digunakan dalam aras makro ini adalah perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik.

Klien atau masyarakat dalam hal ini dipandang sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri serta memilih strategi yang tepat untuk bertindak.

Berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, dalam pandangan yang berbeda Suhendra (2017) melihat strategi pemberdayaan masyarakat dalam beberapa tehnik pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

1. *Participatory Rural Appraisal (PRA)* merupakan pengkajian masyarakat desa secara partisipatif yang dilaksanakan melalui sebelas prinsip yaitu:
  - 1) Prinsip mengutamakan yang terabaikan (keberpihakan)
  - 2) Prinsip pemberdayaan (penguatan) masyarakat
  - 3) Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator
  - 4) Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan
  - 5) Prinsip santai dan informal
  - 6) Prinsip triangulasi
  - 7) Prinsip mengoptimalkan hasil
  - 8) Prinsip orientasi praktis

- 9) Prinsip keberlanjutan dan selang waktu
  - 10) Prinsip belajar dari kesalahan
  - 11) Prinsip terbuka
2. Metode partisipasi assesment dan rencana. Metode pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Metode Loka Karya merupakan metode yang efektif untuk memotivasi anggota peserta menyampaikan aspirasi dan kreativitas. Manfaat yang diperoleh dari metode ini adalah ditemukannya suatu konsensus dan mengambil keputusan untuk suatu fokus permasalahan secara musyawarah
  - 2) Teknik *brainstorming* yaitu teknik yang dapat memotivasi untuk munculnya kreativitas anggota dalam memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi.
  - 3) CO-CD (*Community Organization-Community Development*). Teknik ini dijelaskan secara terpisah dimana CO merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu penyesuaian yang efektif antara sumber sumber dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkup daerah tertentu. CD merupakan teknik yang mengupayakan memajukan kesatuan-kesatuan masyarakat. Menurut Suhendra dalam Darmayanti (2015) CD digunakan sebagai upaya memperbaiki kondisi pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat, kebutuhan materiil dan nonmateriil dalam daerah-daerah yang agraris dan perekonomiannya belum maju
- Dari beberapa pendapat berkaitan dengan proses, tahapan dan strategi

pemberdayaan masyarakat di atas, dalam penelitian ini strategi pemberdayaan masyarakat adalah aktivitas-aktivitas pembentukan kelompok, pendampingan, dan perencanaan kegiatan.

### **2.2.3 Keluarga miskin**

Muzakkir (2017) mengemukakan bahwa keluarga miskin adalah keluarga yang sejak awal tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Perlindungan dan Jaminan sosial adalah; segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Disadari bahwa struktur keluarga terus mengalami perkembangan yang cukup cepat. Perkembangannya tidak saja terletak pada strukturnya seperti dari keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) orang tua tunggal (*single parent*) tetapi juga sebagian fungsifungsinya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari lagi tentang munculnya berbagai pelayanan pengganti fungsi keluarga.

Mengenai pemberdayaan keluarga pada dasarnya ditujukan pada terwujudnya peranan keluarga masing-masing anggota keluarga dan nilai keluarga, terciptanya interaksi dan interelasi setiap anggota keluarga sehingga saling mengisi dan saling melengkapi sehingga terwujudnya keutuhan keluarga dan meningkatnya tanggung jawab sosial keluarga dalam merespon berbagai masukan sosial yang berkembang di masyarakat.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Muzakkir (2017), mendefinisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang

terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin menjelaskan konsep kemiskinan yaitu individu yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Untuk kepentingan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin diperlukan indikator yang lebih merefleksikan tingkat kemiskinan sesungguhnya di masyarakat. Indikator yang dimaksud sebagai berikut :

1. Penghasilan yang rendah dapat diukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar BPS.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan, kemiskinan
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup oleh setiap anggota keluarga pertahun.
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan SD bagi anak-anaknya
6. Tidak memiliki harta kekayaan
7. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
8. Ada anggota keluarga usia 15 tahun keatas yang buta huruf
9. Tidak ada tempat tinggal yang layak huni.

Pengertian kemiskinan absolut menurut Siregar (2019), kemiskinan absolut adalah harta benda atau standar hidup seseorang atau keluarga yang berada di bawah tingkat subsisten. Jika taraf hidup dikategorikan ke dalam tingkatan, yaitu di bawah garis kemiskinan, maka indikatornya sangat mudah diukur.

Berkaitan dengan keluarga miskin adalah keluarga yang sejak awal tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Keluarga yang tergolong miskin, tidak berdaya, tidak memiliki mata pencaharian tetap dan bekerja sebagai buruh tani, nelayan, buruh kasar (tukang batu), tukang kayu, buruh pelabuhan, pendorong gerobak dan lain adalah jenis pekerjaan yang tidak memberi keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup tetapi mendapat tekanan fisik dan dililit hutang sehingga tidak mungkin terlepas dari masalah kemiskinan.

Kelompok keluarga yang potensial harus diberdayakan oleh pemerintah, melalui berbagai program bantuan sosial agar dengan keterampilan yang dimiliki dapat memanfaatkan bantuan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara wajar dan manusiawi. Program pengentasan kemiskinan bagi keluarga ternyata dapat merubah pola pikir dan kecenderungan untuk mengembangkan usaha yang lebih produktif berkat bimbingan dan pembinaan keluarga miskin.

Fakir Miskin dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 1,

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 dijelaskan bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksudkan diatas, sehingga pemerintah atau pemerintah daerah wajib untuk memberikan pelayanan berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai suatu upaya perwujudan negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan warga negara yang miskin sehingga tercapainya kehidupan yang layak.

## **2.2.4 Urban Farming**

### **2.2.4.1 Pengertian *Urban Farming***

Belinda dan Rahmawati (2017) mengemukakan bahwa *Urban Farming* berawal dari Negara Amerika Serikat yang berusaha untuk mengembalikan situasi ekonomi pada saat perang dunia, dimana pada saat itu harga pertanian sangat tinggi. Amerika Serikat membuat 20 juta *victory garden* dengan memanfaatkan lahan yang tersisa, dengan hal tersebut Amerika dapat menyediakan 40% kebutuhan pangan masyarakat

*Urban Farming* dalam bahasa Indonesia ialah pertanian kota. Kegiatan pertanian kota ini ialah pertanian yang memanfaatkan lahan kota yang sudah menyempit dan lingkungan wilayah kota yang sudah tercemar polusi. Pertanian perkotaan adalah bentuk budaya agraris dalam arti luas yang mencakup pertanian, perikanan dan/atau peternakan (pertanian teoritis) atau kegiatan pertanian dalam arti sempit (pertanian perkotaan). Kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Sumber daya yang dihasilkan dari pertanian ini biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi masyarakat dan dijadikan sumber ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat meningkatkan lokalitas pangan. Pertanian perkotaan merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk membantu orang miskin memiliki makanan bergizi yang cukup dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Sektor pertanian merupakan sektor utama penunjang kebutuhan pangan untuk keberlanjutan hidup manusia. Sektor pertanian sangat identik dikembangkan di daerah pedesaan yang memiliki lahan produksi yang luas. Namun, guna menciptakan keseimbangan dalam ketahanan pangan maka pertanian di wilayah perkotaan juga perlu dikembangkan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan sumber daya alam.

Secara umum, pertanian perkotaan atau dikenal dengan istilah *Urban Farming* merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan dengan konsep pemanfaatan lahan sempit dan lahan kosong. *Urban Farming* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan pertanian di pedesaan,

antara lain memiliki bentuk yang berbeda meliputi bentuk kegiatan sosial dan komersial, serta selaras dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di perkotaan.

#### **2.2.4.2 Kegiatan *Urban Farming***

*Urban Farming* ini kegiatan berkebun di tengah perkotaan yang marak dilakukan di Kota-kota besar. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomi saja tetapi juga berguna bagi kesehatan. Kegiatan ini biasanya memanfaatkan lahan yang terbatas, seperti perkarangan rumah atau tanah kosong yang ada di lingkungan sekitar. Hasil dari kegiatan ini biasanya bisa diolah sendiri untuk kemudian dikonsumsi atau didistribusikan. *Urban Farming* merupakan kegiatan budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian terpadu) yang memadukan antara pertanian, perikanan, dan peternakan, atau suatu kegiatan pertanian dalam arti sempit (pertanian). Kegiatan ini bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pertanian perkotaan dapat dilakukan dengan konsep tidak mempunyai lahan yang luas, seperti menggunakan kantong plastik atau menggunakan lahan hijau (Septya et al,2022).

*Urban Farming* biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang sering dikonsumsi, seperti sayuran, jamur, buah, umbi-umbian, tanaman obat, atau tanaman hias. *Urban Farming* dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Siapkan wadah dan lahan untuk menanam.
2. Siapkan media tanam yang cocok, seperti tanah kebun. Dana juga bisa memanfaatkan benda lain sebagai campuran media tanam, seperti kulit kacang, sabut kelapa, atau serutan kayu.
3. Perhatikan sumber pengairan jika Dana berniat untuk bercocok tanam.

4. Siapkan bibit tanaman yang hasilnya bisa Dana gunakan atau konsumsi, seperti tomat, timun, kol, dan jahe.

Selain bercocok tanam, *Urban Farming* juga bisa dilakukan dengan cara berternak hewan yang biasa dikonsumsi, seperti unggas, kelinci, kambing, domba, sapi, dan ikan. Langkah yang perlu dilakukan pun sama dengan bercocok tanam. Namun, perlu menyesuaikan lahan yang dimiliki dengan jenis ternak yang akan dipelihara.

#### **2.2.4.3 Manfaat *Urban Farming***

Pelaksanaan *Urban Farming* dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur dan lahan kritis, pemanfaatan ruang terbuka hijau (privat dan publik), pengoptimalan kebun sekitar rumah, dan penggunaan ruang (*verticulture*). Beberapa manfaat dari *Urban Farming* ini menurut Golden dalam Pradana dan Wdanari (2023) yaitu:

- 1) Menciptakan kawasan perkotaan yang kompak dan menghasilkan kebutuhan pangan bagi penduduk kota secara mandiri, sekaligus lebih efisien dalam mengurangi biaya distribusi pangan dan mengurangi kebutuhan energi.
- 2) Melestarikan budaya domestikasi tanaman dan hewan serta memberi kesempatan dan pembelajaran bagi generasi mendatang untuk lebih peduli pada pemenuhan kebutuhan pangan.
- 3) Menciptakan lingkungan yang berorientasi pada penyediaan sumber daya pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

#### **2.2.4.4 Jenis-jenis *Urban Farming***

Menurut Balai Besar Pelatihan Pertanian pada sebuah penelitian mengenai *Urban Farming* menurut (Saputro, 2023) memiliki beberapa tipe, yakni:

1. Tipe A; Perkebunan dalam pot/*Polybag*/wadah daur ulang lainnya. Tanaman yang ingin ditumbuhkan ditanam di dalam pot/*Polybag*/wadah daur ulang serta ditempatkan di lahan yang kosong, baik dipekarangan rumah, maupun di tempat yang memungkinkan untuk ditempatkan pot/*Polybag*/wadah, seperti di teras rumah.
2. Tipe B; Rumah dengan tanaman produktif di halaman (satu rumah satu pohon). Tanaman yang biasanya ditanam pada tipe ini ialah tanaman tahunan yang memiliki daun yang lebat, seperti menanam pohon mangga di pekarangan rumah.
3. Tipe C; Pekarangan rumah bermanfaat sayuran atau tanaman hias. Tipe ini hampir sama dengan tipe A, namun dalam pemilihan wadahnya tidak menggunakan pot/*Polybag*/wadah lainnya, melainkan langsung di tanah dengan cara dibuatkan bedengan kemudian langsung ditanami.
4. Tipe D; Tanaman pada dinding (vertikultur). Tipe ini biasanya menggunakan botol plastik bekas sebagai wadah lalu ditempelkan ke dinding pekarangan rumah atau di dinding jalan/lorong. Tanaman yang

biasa ditanam merupakan tanaman sayuran yang cepat tumbuh dan dapat dipanen dengan cepat pula, seperti kangkung dan sawi.

5. Tipe E; Tanaman merambat pada pagar. Biasanya tanaman yang digunakan ialah tanaman khusus yang memiliki sifat merambat di pagar maupun tembok rumah.

#### **2.2.4.5 Program BURUAN SAE Sebagai Bentuk *Urban Farming***

Menurut Suherman dan Qasim (2022) Pertumbuhan Pertumbuhan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan jumlah penduduk Kota Bandung khususnya meningkat sebanyak 7000 jiwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020 (BPS,2020). Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak buruk jika tidak dibarengi dengan peningkatan persediaan pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, sejak tahun 2020, komunitas internasional sedang mengalami pdaemi COVID-19, sehingga memberikan tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi potensi kerawanan pangan. Menyikapi situasi pdaemi ini, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Buruang Sae (BS) yang diluncurkan pada bulan September 2020 (mediaindonesia.com) yang merupakan program pemerintah kota (buruansae.Bandung.go.id) BS (Buruan Sae) ini adalah program yang membantu mengatasi masalah kesenjangan gizi di kota Bandung dan meningkatkan kualitas gizi bagi masyarakat pemilik peternakan kecil maupun besar. Program tersebut memiliki tujuan positif untuk membantu keluarga mencapai kemandirian gizi sekaligus meningkatkan kemandirian gizi mereka. Buruan SAE adalah singkatan dari Sehat, Alami, Ekonomis. S. Akibatnya, produktivitas tanaman

pangan menjadi berkurang karena fungsi lahan pertanian sebagai tempat produksi yang semakin sedikit. Di sisi lain, jumlah permintaan akan kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Peningkatan ketahanan pangan di Kecamatan Rancasari Kota Bandung dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri yang dimulai dari tingkat rumah tangga. Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menggalakkan sebuah inovasi program *integrated Urban Farming* bernama “Buruan SAE” pada 2020 sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan menanggulangi masalah ketersediaan pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Nama “Buruan SAE” berasal dari kata “Buruan” dalam bahasa Sunda berarti pekarangan atau halaman, sedangkan kata “SAE” dalam bahasa Sunda memiliki arti bagus dan merupakan akronim dari kata Sehat, Alami, dan Ekonomis.

Tujuan dari program “Buruan SAE” yaitu untuk mendorong masyarakat Kota Bandung agar mampu menghasilkan bahan pangan yang sehat, alami, dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri. “Buruan SAE” merupakan sebuah upaya untuk dapat mewujudkan Kota Bandung sebagai green city dan telah berhasil menjadikan Kota Bandung sebagai sebuah rujukan model *Urban Farming* di Indonesia. Konsep “Buruan SAE” juga telah menarik perhatian kalangan dunia internasional dan menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu anggota *Milan Urban Policy Pact* (MUPP) sejak tahun 2020 yang mewakili negara-negara di ASEAN Saat ini, terdapat lebih dari 300 unit

kelompok “Buruan SAE” yang berkembang di berbagai Kota Bandung.

## **2.3 Kajian Tentang Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan**

### **2.3.1 Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan**

Menurut Poluakan (2019) Pekerjaan sosial merupakan profesi utama dalam sebuah usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan. Proses pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada individu tetapi juga memperhatikan aspek budaya dan struktural masyarakat

Pekerjaan sosial muncul sebagai sebuah profesi setelah Black Death , yaitu kematian massal yang disebabkan oleh wabah penyakit di Inggris pada abad ke-14 yang mempengaruhi kondisi orang yang berada dalam kemiskinan (Sitepu, 2017). Oleh karena itu, pekerjaan sosial erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan karena pekerjaan sosial muncul dari permasalahan kemiskinan (Ihartono dkk, 2016).

Selain itu, pekerjaan sosial juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi-situasi sosial bagi kehidupan mereka. Situasi-situasi yang dimaksud adalah terciptanya peluang dan kesempatan kerja/usaha, terbukanya akses usaha, adanya jaminan usaha, dan informasi pasar. Dalam konteks itu, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan tidak hanya diarahkan kepada si klien (masyarakat miskin), tetapi juga ditujukan kepada situasi-situasi sosial yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal tersebut didasari oleh pendekatan pekerjaan sosial yang senantiasa berorientasi pada *person-in situation* atau *person-in environment* (orang di dalam situasi atau orang di dalam lingkungan).

### 2.3.2 Peran Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan masyarakat menurut Zastrow yang dikutip Huraerah (2008), antara lain:

1. Fasilitator perubahan (*Enabler*). Pekerja sosial membantu masyarakat mengenali masalah yang mereka hadapi dan mendukung masyarakat untuk mengungkapkan keperluan mereka. Kemudian, pekerja sosial mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah dengan lebih efisien.
2. Perantara (*Broker*). Pekerja sosial menjembatani individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan komunitas, tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang cara mendapatkan pelayanan tersebut dari lembaga yang menyediakannya. Peran ini melibatkan klien dalam proses interaksi, sehingga ketika pendampingan berakhir, klien memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan lembaga yang relevan.
3. Ahli (*Expert*). Peranan pekerja sosial yang menyediakan informasi dan memberikan saran-saran yang dapat membangun upaya untuk mencapai kondisi sejahtera. Saran dan rekomendasi tersebut tidak selalu harus dijelaskan secara langsung oleh klien (komunitas atau organisasi), tetapi berfungsi sebagai dasar gagasan yang penting untuk dipertimbangkan oleh komunitas atau organisasi dalam mengambil keputusan.
4. Pendidik (*Educator*). Pekerja sosial diharapkan memiliki keterampilan untuk mengomunikasikan informasi dengan cara yang efektif dan mudah

dipahami oleh masyarakat yang berupaya mengalami perubahan. Karena itu, diperlukan pengetahuan yang memadai agar pekerja sosial dapat menyampaikan informasi dengan efisien. Dalam peran ini, pekerja sosial harus bersedia terus belajar serta mengikuti perkembangan masyarakat dan tren permasalahan yang berkembang.

5. Perencanaan Sosial (*Social planner*). Peranan pekerja sosial yang merujuk pada pengumpulan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terjadi, menganalisa fakta tersebut, dan menyusun strategi alternatif dalam pemecahan masalah.
6. Advokat (*advocate*). Pekerja sosial ikut turut terlibat dalam usaha advokasi atau pendampingan bagi komunitas yang memerlukan sumber daya atau layanan khusus, namun lembaga yang diharapkan menyediakan bantuan atau layanan tersebut tidak menunjukkan perhatian yang memadai. Dalam peran ini, seorang pekerja sosial seringkali harus melakukan upaya persuasi terhadap kelompok profesional atau elit untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
7. Aktivis (*Activist*). Peran pekerja sosial ini bertujuan untuk memicu perubahan mendasar dalam struktur lembaga yang sering kali berujung pada penyediaan ulang sumber daya atau kewenangan kepada kelompok yang lebih rentan. Pekerja sosial diharapkan untuk memperhatikan isu-isu khusus seperti pelanggaran hukum yang berlaku, kesenjangan, dan pencabutan hak.

Dalam hal ini, peran pekerja sosial yang sesuai dengan penelitian ini,

antara lain :

- 1) Fasilitator perubahan (Enabler). Peran pekerja sosial ini membantu masyarakat untuk mengenali masalah yang mereka hadapi dan mendukung masyarakat untuk mengungkapkan keperluan mereka. Dengan demikian pekerja sosial memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial dan kultural masyarakat setempat. Mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh Keluarga Miskin di Kecamatan Rancasari.
- 2) Perantara (*Broker*). Pekerja sosial mampu menghubungkan sumber daya yang dapat membantu menghubungkan keluarga miskin dengan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya peran ini, pekerja sosial membantu memastikan bahwa program *urban farming* tidak hanya diterapkan, tetapi juga benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan bagi keluarga miskin di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.
- 3) Pendidik (*Educator*). Pekerja sosial dapat meningkatkan memberikan dan keterampilan yang diperlukan kepada keluarga miskin untuk menjalankan program *urban farming* ini secara efektif. Pekerja sosial juga membantu meningkatkan motivasi dan komitmen dalam menjalankan program *urban farming* ini.

### **2.3.3 Kajian tentang Metode Community Organization / Community Development (CO/CD)**

Pekerjaan sosial dengan salah satu metodenya, yaitu *Community Organization/Community Development* (CO/CD) dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Gilbert dan Specht,

dalam Alghifari dan Fatoni (2022) CO/CD adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan segala potensi yang mereka miliki, sehingga pada tahap tertentu berbagai aktifitas tersebut membutuhkan kelembagaan dan institusi yang lebih formal. Bekerja bersama masyarakat (*working with people*) dan menolong masyarakat untuk menolong dirinya sendiri (*to help people to help them selves*).

#### **2.3.4 Dimensi, Fokus, dan Tipe Kegiatan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)**

Dalam pengembangan kapasitas, terdapat dimensi, fokus dan tipe kegiatan yang dikemukakan oleh Grindle dalam Alam dan Prawitni (2015), yaitu:

1. Dimensi pengembangan sumber daya manusia, dengan fokus peningkatan profesionalisme dan kemampuan teknis personil. Tipe kegiatan yang terkait mencakup pelatihan, praktik langsung, peningkatan kondisi iklim kerja, dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus pada peningkatan tata kelola (manajemen) untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi. Tipe kegiatan yang relevan mencakup insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan struktur manajerial.
3. Dimensi reformasi kelembagaan, dengan fokus pada perubahan dan perbaikan sistem kelembagaan dan makrostruktur. Tipe kegiatan yang terkait meliputi pembuatan aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan regulasi, serta informasi konstitusi.

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang dialami oleh individu, kelompok, dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang diemban dan mencapai hasil yang diinginkan.

### **2.3.5 Tujuan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)**

Menurut Marrison dalam (Erawaty, 2018) Peningkatan kapasitas adalah rangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja. Lebih lanjut Marrison menyatakan bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu bentuk pembelajaran yang dimulai dari kebutuhan untuk mengalami sesuatu, mengurangi ketidaktauhan dan ketidakpastian dalam kehidupan, serta dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses pembelajaran yang dapat membantu individu, kelompok, atau organisasi untuk meningkatkan kemampuan, mengatasi ketidakpastian, dan menghadapi perubahan